



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Page 153-167

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Implementasi Kebijakan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tiga Kilogram Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo

Syamsiar<sup>1</sup>, Sitti Aminah<sup>2</sup>, Besse Herlina<sup>3</sup> ✉, Muhammad Farid<sup>4</sup>, Sumarni<sup>5</sup>

Program Magister Administrasi Publik, Universitas Puangrimaggalatung

Email: [besseherlina23@gmail.com](mailto:besseherlina23@gmail.com)<sup>1</sup> ✉

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kilogram dan untuk mengetahui faktor-faktor determinan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kilogram di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dengan menggunakan dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, adanya ketepatan sasaran dan tujuan telah di transformasikan ke aktor dan objek, termasuk konsistensi dan komitmen pelaksana kebijakan sudah efektif dan berjalan dengan baik. Dalam aspek karakteristik kebijakan dan struktur birokrasi terlihat penerapan SOP oleh agen/distributor selaku pelaksana telah di implementasikan dengan baik, namun masih memerlukan langkah nyata dalam mewujudkan program subsidi LPG 3 Kg ini, terutam karena masih ditemukan kelemahan pada distribusi dan penyaluran ke public secara tertutup dan masih pula menerapkan system terbuka.

*Kata Kunci : Implementasi Kebijakan dan Subsidi LPG 3 Kg*

### Abstract

The study aims to determine the implementation of the 3-kilogram LPG liquefied petroleum gas subsidy policy and to determinane the determinant factors encountered in the implementation of the subsidy policy in Tempe Distrik, Wajo Regency. The results of this study indivate that the accuracy of goals and objectives has and objektivities and objects, including the commitment of policy implementers that have been effective and are running well. In the aspect of policy characteristics and bereucratic strukture, it can ve seen that the implementation of standards by agrn or distributors as executors has been well

implemented, but it still requires concrete steps in realizing the subsidy program, especially because there are still weaknesses in distribution and distribution to public schools in a closed manner and still implementing on open system.

Keywords : *Policy Implementation and subsidies for LPG 3 Kilograms*

## PENDAHULUAN

Eksistensi organisasi pemerintah yang baik dengan adanya Badan Usaha Milik Negara Melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, telah mengeluarkan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan sub penyalur LPG 3 Kilogram (LPG tertentu). Hal tersebut telah dapat di implementasikan melalui Surat Edaran No : 13.E/MG.05/DJM/2022 tentang pelaksanaan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas melalui penyalur serta sub penyalur Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

Permasalahan real ditengah-tengah masyarakat sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, menunjukkan bahwa begitu lemahnya pengawasan atas implementasinya kebijakan tersebut padahal sangat jelas permasalahannya, dimana beberap hal yang berkontribusi dalam kelangkaan tersebut terlihat dari beberapa aspek penting, diantaranya penetapan alokasi/quota sudah tidak sesuai dengan kebutuhan yang real yang ada di masyarakat, jumlah personil yang terbatas dan wilayah sangat luas sehingga sulit dijangkau menjadi faktor penghambat dalam melakukan pendistribusian, banyaknya aktor implementasi dengan sudut pandang yang berbeda dalam orientasi pelayanan masyarakat, termasuk rantai komunikasi antar organisasi yang panjang termasuk informasi yang kurang lengkap, bias, tidak konsisten dalam melewati proses menjadikan implementasi kebijakan publik mengalami hambatan.

Berkenaan dengan implementasi kebijakan subsidi LPG 3 Kilogram, dimana hasil pengamatan dan observasi penulis menunjukkan bahwa aspek birokrasi memerlukan komitmen dalam membangun sistem yang terbuka dan tertutup, termasuk struktur birokrasi dengan konsisten dalam menggunakan standar operasional prosedur.

Implementasi kebijakan ini sangat berpengaruh pada faktor sumberdaya mulai pihak dari hulu ke hilir (produksi sampai pada pengecer) memerlukan kompetensi dan sumberdaya, finansial agar dapat berjalan secara efektif termasuk dalam konteks komunikasi yang sangat lemah sehingga permasalahan ini sangat berlaut-larut dan berdampak pada implementasi kebijakan subsidi LPG 3 Kilogram ini tidak berjalan maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kilogram dan faktor-faktor determinan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kilogram di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Sementara tujuan dan manfaat yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kilogram dan untuk mengetahui faktor-faktor determinan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Subsidi LPG 3 Kilogram di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.

Perkembangan ilmu administrasi public sebagaimana Robert T Golombiewski (dalam Yogi Suprayogi, 2011: 10) menyatakan bahwa 'Administrasi public menekankan kepada focus dan locus. Fokus ini diartikan sebagai memperlihatkan tempat dari bidang studi tersebut sedangkan lokus sendiri memperlihatkan pada tempat dari bidang studi tertentu. Oleh karena itu Golombiewski mencoba mempermudah pemikiran ini dengan memperhatikan pada tingkatan mana suatu paradigma itu masuk.

Dye dalam Harbani Pasolong (2008) mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Implementasi diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya pada tingkat abstraksi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang public, dan keputusan yudisial. Misalnya apakah kemiskinan telah bisa dikurangi atau warga negara merasakan lebih aman dalam kehidupan sehari-harinya dibandingkan pada waktu sebelum penetapan program kesejahteraan sosial atau kebijakan pemberantasan kejahatan. Singkatnya implementasi sebagai suatu konsep semua kegiatan ini. Sekalipun implementasi merupakan fenomena yang kompleks, konsep

itu bisa dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak implementasi juga melibatkan sejumlah actor, organisasi dan teknik-teknik pengendalian. Budi Winarno (2007-144)

Dalam perkembangannya, konsep-konsep implementasi kebijakan dalam berbagai literature-literatur banyak dikemukakan berbagai konsep, teori atau model implementasi kebijakan dalam beragam perspektif yang berbeda. Subarsono (2005-88)<sup>3</sup> konsep-konsep atau teori-teori tersebut dikembangkan oleh teoritis sebagaimana diuraikan lebih lanjut

1. Konsep implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) sebagai proses "a model of the policy implementation" yang menekankan pada tindakan yang dilakukan secara individu atau pejabat-pejabat, kelompok dan swasta yang diarahkan pada prinsip tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2. Konsep implementasi kebijakan menurut Hoogwood dan Gunn yang dikenal model "top-down" yang dibangun berdasarkan konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktek manajemen yang sistematis tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pokok.

3. Konsep implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) mengembangkan model kerangka analisis implementasi kebijakan "A Framework For Implementation Analysis" yang menekankan peran sebagai kemampuan pejabat pelaksana dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal atau keseluruhan proses implementasi.

4. Konsep implementasi kebijakan Edwards III (1980), yang menyatakan studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi public administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan. Subarsono (2005-89) menurut beberapa pandangan para ahli dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Van Meter dan Van Horn* (1975) menyatakan variabel mempengaruhi kinerja implementasi yakni; a) Standar dan sasaran kebijakan standar harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan, apabila kabur maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. b) Sumber daya. Diperlukan dukungan sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainnya karena penyebab gagalnya

implementasi kebijakan dikarenakan kompetensi dan kemampuan serta terbatasnya sarana pendukung. c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas.

2. Diperlukan dukungan dan hubungan koordinasi antar instansi dalam keberhasilan program. d) Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola hubungan dalam birokrasi. e) Kondisi sosial ekonomi dan politik kelompok-kelompok kepentingan harus memberi dukungan sehingga kebijakan dapat terimplementasikan dengan baik. f) Disposisi implementator mencakup tiga hal; respon implementator, kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan instensitas yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

3. 2. Edwards III (1980) bahwa implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat variabel yakni; a) Komunikasi, Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. b) Sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. c) Disposisi disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik. d) Struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar SOP (*standard operating procedures*)

4. Mazmanian, Daniel A dan Sebatier (1983) menyatakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni; a) Karakteristik masalah.(1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang yang bersangkutan (2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran (3) Proposisi kelompok sasaran terhadap total populasi (4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. b) Karakteristik kebijakan; (1) Kejelasan isi kebijakan, (2) Dukungan teoritis, (3) Besarnya alokasi sumberdaya, (4) Adanya dukungan antar berbagai institusi pelaksana, (5) Kejelasan aturan yang ada, (6) Komitmen aparat, (7) Luasnya akses partisipasi dalam implementasi. c) Lingkungan kebijakan, (1) kondisi social ekonomi masyarakat, (2) Dukungan public, (3) Sikap dari kelompok pemilih, dan (4) Tingkat komitmen dan keterampilan aparat.

5. 4. Grindle di Negara-negara dunia ke tiga dapat diidentifikasi sebagai berikut :  
a) *contents of policy* yang meliputi; *intrestaffected* (kepentingan siapa saja terlibat), *type of benefits* (macam-macam manfaat), *extens of change envisioned* (sejauhmana perubahan akan diwujudkan), *site of decision-making* (tempat pembuatan keputusan), program implementers (sumber daya yang tersedia), dan b) *Context of implementation* meliputi; *power, intrest, and strategy of actors involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi actor yang terlibat), *institution and regime characteristic* (karakteristi lembaga dan rezim) dan *compliance and resvonsivennes* (sesuai dengan kaidah responsif). hasil implementasi kebijakan berdampak pada masyarakat (grindle,1980:11)

Dasar hukum yang yang mejadi acuan atau pedoman dalam subsidi LPG 3 kilogram adalah :

- a. UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- b. Perpres No. 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional
- c. Perpres No. 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram.
- d. Permen SDM No. 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.
- e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas.
- f. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gasa (LPG) dan sub penyalur LPG 3 Kilogram (LPG tertentu).

Selanjutnya telah ditetapkan sebuah surat edaran secara operasional dalam menterjemahkan sebuah peraturan dan perundang-undangan tersebut telah dapat di implementasikan melalui Surat Edaran No : 13.E/MG.05/DJM/2022 tentang pelaksanaan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas melalui penyalur serta sub penyalur Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi pada Wilayah Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dengan penelitian lapangan yakni dengan melakukan pengumpulan data penelitian secara langsung pada obyek dengan maksud diperoleh data lapangan yang dijamin kebenaran

dan kesahihannya, dalam bentuk wawancara, untuk itu dilakukan penelitian sejumlah masyarakat dan pengecer LPG 3 Kilogram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni suatu bentuk penelitian yang memberikan gambaran mengenai objek yang diamati atau fokus penelitian.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan dalam konteks implementasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg dilihat dari perspektif penyaluran dan pendistribusian dengan melihat faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik, di wilayah Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dengan sub fokusnya dapat dijelaskan sebagai berikut : a). Komunikasi, Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. b). Sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. c). Disposisi, Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik, dan d). Struktur birokrasi Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar *SOP (standard operating procedures)*.

Sesuai hasil observasi pada objek penelitian yang menjadi sumber informasi adalah unsur pimpinan dan pegawai OPD (organisasi perangkat Daerah), Kepala Bagian Sekda, pengecer dan masyarakat, sebanyak 5 orang yakni; Kadis 1 orang, Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah 1 orang, Agen LPG 3Kg 1 orang, masyarakat selaku pengguna LPG tiga Kg 1 orang dan Agen LPG 3 Kg 1 orang, tidak banyak dan serta dapat dijangkau dari keseluruhan informan utama dan memungkinkan peneliti dapat menjalankan penelitiannya dengan sangat mudah

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrument penelitian yang utama adalah peneliti sendiri. Penempatan peneliti jika dipenuhi beberapa syarat, antara lain; yang bersangkutan memiliki sikap responsive, memiliki kemampuan penyesuaian diri, menekan keutuhan (memanfaatkan imajinasi dan kreativitasnya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan), kemampuan mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan,

memproses data secepatnya, untuk mengklarifikasi dan mengiktisarkan serta memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim dan indiosintrik (Sumarsono, 2008). Teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi.

Data yang telah dikumpulkan, diolah dan menggunakan penelitian kualitatif serta analisis domain untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dan dilakukan secara interaktif melalui proses data reduksi, data display dan verification (Miles and Huberman 1984) dalam Sugiyono 2010 : 294). Dalam rencana pengujian keabsahan data penulis menggunakan uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan keikutsertaan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat. Pengujian Transferability, Dependability dan pengujian konfirmability. (Sugiyono 2010 : 368-377)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk dari hasil wawancara, dengan menggunakan pola wawancara berstruktur terhadap informan utama dan informan tidak berstruktur, dapat diuraikan bahwa pada tataran implementasi kebijakan dengan perspektif komunikasi dimana transformasi sasaran kebijakan secara regulasi telah terlihat sasaran subsidi LPG 3 Kg ini berjalan dengan baik, namun demikian pada tataran implementasi ditemukan masih banyak permasalahan yang terjadi khususnya pada sasaran yang kurang tepat, olehnya itu memerlukan pengawasan langsung oleh pihak BUMN melalui SKK Migas atau dapat meibatkan langsung dengan pemerintah setempat, sehingga maksud dan tujuannya tepat sasaran kepada masyarakat miskin atau pelaku UMKM.

Sementara tataran implementasi kebijakan dengan perspektif komunikasi dimana transformasi tujuan kebijakan secara regulasi sesuai Perpres 104 Tahun 2007 telah terlihat tujuua subsidi LPG 3 Kg ini adalah untuk menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak guna mengurangi beban negara, maka pemerintah mengalihkan subsidi ini ke masyarakat miskin dan pelaku UMKM melalui penyaluran subsidi LPG 3 Kg. hal tersebut terlihat bahwa masih pada posisi penyaluran yang tidak tepat sasaran sehingga tujuan dengan transformasi informasi ini masih memerlukan perhatian khusus, dimana pada tataran implementasi terlihat ada masalah, olehnya itu memerlukan pengawasan.

Berkenaan pada konteks isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Salah satu indikator utama agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik adalah ketersediaan sumberdaya, baik dari sisi manusia, finansial, sarana dan parasaran serta dukungan masyarakat dapat menghasilkan kinerja kebijakan yang baik. Dalam perspektif sumberdaya dimana konsistensi implementator dan distributor dalam upaya merealisasikan sebuah kebijakan dengan tujuam dan sasaran yang diharapkan, sudah mampu mewujudkan dan menghadirkan kebutuhan masyarakat melalui LPG 3 Kg, dengan maksud memabantu masyarakat miskin dan UMKM guna dapat terpenuhi kebutuhan hak dasarnya dengan baik.

Terkait dengan Kebijakan program subsidi LPG 3 Kg ini sesuai dengan semangat yang dibangun adalah sasaran utamanya masyarakat miskin dan UMKM memerlukan sebuah konsistensi serta komitmen yang tinggi dengan karakteristik oleh pelaksana kebijakan. Disposisi dimana konsistensi distributor dalam upaya merealisasikan sebuah kebijakan terlihat dari konsistensi distributor ini mampu menjabarkan segala kemampuan agar penyaluran subsidi LPG 3 Kg ini sampai kemasyarakat dengan baik. Konsistensi ini memerlukan fasilitas dan sarana pendukung layanan kepada sub pelaksana dilapangan, agar masyarakat dengan cepat dan tepat sampai kemasyarakatan terutama yang bergerak dalam UMKM, hal ini telah berjalan dengan baik.

Demikian pula kaitan dengan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasional yang standar *SOP (standard operating procedures)*. Kebijakan ini memerlukan mekanisme dan sistem kerja yang baik guna memastikan khirarki kerja terpedomani dan tidak menyimpang dari aturan dan perundang-undangan yang berlaku. implementasi kebijakan dengan perspektif struktur birokrasi struktur dimana *SOP (standard operating procedures)* implementator menunjukkan adanya sistem dan mekanisme kerja dalam memenuhi tugas dan fungsi masing-masing selaku agen dan distributor serta sub pelaksanan dilapangan sehingga penyaluran dapat berjalan dengan baik. Termasuk *SOP (standard operating procedures)* distributor menunjukkan adanya pedoman teknis bagi semua pihak melaksanakan system dan mekanisme kerjanya mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat miskin dan UMKM dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan di atas, peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan menggunakan pengabsahan data dengan

ujikredibilitas melalui perpanjangan pengamatan dan triangulasi, maka berikut ini akan dipaparkan analisis Implementasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg.

Sebagai bahan analisis penulis untuk menjawab permasalahan sebagaimana tertuang dalam latarbelakang masalah, maka konsep analisis mengacu pada pandangan Edward III dalam Subarsono (2005-89) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg ini. Menurutnya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan merupakan konsep yang dinamis dan melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari akan dan apa yang dapat dilakukan. Implementasi mengatur aktivitas yang mengarah kepada penempatan suatu program, dimana hasil tersebut dapat diuraikan pembahannya yakni, aspek komunikasi, dimana implementasi kebijakan dengan perspektif komunikasi dimana transformasi sasaran kebijakan secara regulasi telah terlihat sasaran subsidi LPG 3 Kg ini berjalan dengan baik, namun demikian pada tataran implementasi ditemukan masih banyak permasalahan yang terjadi khususnya pada sasaran yang kurang tepat. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dengan komunikasi melalui transformasi sasaran dan tujuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih perlu diintegrasikan dan serta percepatan dan menanggulangi berbagai permasalahan dilapangan terutama dalam sasaran subsidi ini dapat terjangkau kepada semua masyarakat yang berhak melalui pemberin informasi yang tepat sehingga LPG 3 Kg tidak langka di masyarakat karena tidak digunakan yang tidak memiliki hak, demikian pula penyaluran dapat mengurangi kendala-kendala waktu penyalurannya dengan baik. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Mater Van Horn bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan kinerja dan sasaran tertentu harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

Berkenaan dengan faktor sumberdaya, bahwa pada tataran implementasi kebijakan dengan perspektif konsistensi implementator dalam upaya merealisasikan sebuah kebijakan dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, sudah mampu mewujudkan dan menghadirkan kebutuhan masyarakat melalui LPG 3 Kg, dengan maksud membantu masyarakat miskin dan UMKM guna dapat terpenuhi kebutuhan hak dasarnya dengan baik. Konsistensi ini terlihat dalam upaya pembinaan dan pengawasan agar proses layanan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan atauran yang telah ditetapkan. Hasil dari temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dengan sumberdaya melalui

konsistensi implemantator dan distributor merupakan wujud jalanya kebijakan guna dapat membantu public dalam menggerakkan ekonomi dan pemenuhan hak dasarnya, ketersediaan sumberdaya yang ada sangat memudahkan kebijakan terimplementasi karena didukung oleh adanya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan.

Terkait dengan faktor disposisi, dengan perspektif komitmen distributor tersebut mampu mewujudkan dengan berdasar pada aturan yang ada, serta karakteristik lingkungan sangat mendukung dan mampu mengelaborasi dengan pihak pemerintah masyarakat dengan baik. Hasil dari temuan peneliti secara empiris berdasarkan informasi informan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dengan disposisi melalui komitmen distributor ini, tidak lepas atas adanya aturan secara terstruktur dan prosedur yang jelas sehingga proses penyaluran dapat diwujudkan dan ditingkatkan atas dasar kerjasama yang baik antara agen, sub agen dan masyarakat. Hal tersebut dapat dinyatakan telah berjalan dengan baik. Dalam perspektif disposisi dimana kejujuran yang bersifat demokratis merupakan wujud dari integritas atas komitmen yang dibangun melalui fakta integritas dengan pihak pemerintah dan agen/distributor agar penyaluran sesuai dengan aturan dan penerima yang memiliki hak yaitu masyarakat dan UMKM. Hasil dari temuan peneliti secara empiris berdasarkan informasi informan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dengan disposisi melalui kejujuran yang bersifat demokratis ini, menunjukkan bahwa karakteristik kebijakan ini sudah terbangun melalui integritas pelaksana kebijakan termasuk agen/distributor dan sub pelaksana untuk menyalurkan LPG 3 Kg ini sesuai dengan sasaran dan tujuannya. Wujud penyaluran itu pada implementasinya bersifat demokratis dan dilakukan secara terbuka dan tertutup dalam penyalurannya dengan baik.

Demikian pula kaitan dengan factor struktur birokrasi, dimana implementasi kebijakan dengan perspektif struktur birokrasi dimana SOP (*standard operating procedures*) implementator menunjukkan adanya system dan mekanisme kerja dalam memenuhi tugas dan fungsi masing-masing selaku agen dan distributor serta sub pelaksanaan dilapangan sehingga penyaluran dapat berjalan dengan baik. Hasil dari temuan peneliti secara empiris berdasarkan informasi informan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dengan struktur birokrasi melalui penetapan SOP (*standard operating procedures*) menjadi standar dalam melakukan system dan mekanisme penyaluran subsidi LPG 3 Kg ini, hal tersebut memperlihatkan adanya konsistensi semua

implementator dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dan telah terselenggara dengan baik. Termasuk struktur birokrasi dimana SOP (*standard operating procedures*) distributor menunjukkan adanya pedoman teknis bagi semua pihak melaksanakan system dan mekanisme kerjanya mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat miskin dan UMKM dengan baik. Hasil dari temuan peneliti secara empiris berdasarkan informasi informan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dengan struktur birokrasi melalui penetapan SOP (*standard operating procedures*) distributor menjadi bagian dari upaya efisien dan efektif pelaksanaan program subsidi LPG 3 Kg ini, hal tersebut memperlihatkan adanya kemauan yang kuat untuk menjadikan standar ketja ini dalam mengukur kinerja imilementasi kebijakan dengan baik

Faktor pendukung dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan sebagaimana keberadaan program subsidi LPG 3 Kg ini adalah upaya menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat miskin dan UMKM, salah satu keunggulan sebagai bagian factor determinan kebijakan ini adalah adanya ketersediaan LPG3 Kg di hulu/pertamina cukup memadai, dan ditopang oleh sumber daya Kabupaten Wajo terkait dengan LPG ini.

Dalam hambatan dalam program subsidi LPG 3 Kg ini sangat terlihat dari pespektif transformasi dan mobilisasi serta birokrasi yang cukup panjang, dimana BUMN selaku pelaksana tunggal telah melakukan berbagai perspektif. Hambatan pertama adalah dari segi lemahnya Pengawasan penyaluran program subsidi LPG 3 Kg yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penyaluran program ini, termasuk aspek pengetahuan dan pemahaman para implementator dalam menyusun data tentang konsep program ini dalam pengelolaan administrasi yang cepat terkait dengan teknis materi layanan yang dibutuhkan dalam pengelolaan pemerataan subsidi ini, sehingga banyak diantara implementator kurang maksimal dan sering terlambat dalam menjalankan tugasnya penyalurannya serta berdampak pada ketercapaian kinerjanya dengan baik.

Hambatan lain adalah adanya kelangkaan LPG 3 Kg ini, menjadi perhatian khusus pemerintah dan memerlukan pengawasan yang mendalam sebab kelangkaan ini dapat terjadi karena distribusi mengalami permasalahan pada mobilisasi sehingga kadang tertunda, ada juga oknum serta adanya tangan-tangan tidak bertanggungjawab sehingga hal tersebut sering mengalami kelangkaan., termasuk kurangnya pelibatan stakeholders sehingga kesmrautan penyaluran program subsidi LPG 3 Kg ini terjadi serta kurangnya

Standar Operasional Pelayanan distributor belum maksimal dilakukan.

Sebagaimana kelemahan program subsidi LPG 3 Kg, diperlukan solusi atau pemecahan masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dimana adanya kelemahan pada aspek pengawasan, kelangkaan LPG 3 Kg dan penggunaan standar kerja distributor relatif kurang maksimal dijalankan oleh implementator dapat diberikan solusi antara lain adalah organ-organ yang terlibat dari pemerintah melalui BUMN dapat berkolaborasi dengan pemerintah setempat guna memastikan program ini dapat berjalan, koordinasi sangat diperlukan, karena pemerintah daerah yang tahu kondisi masyarakatnya olehnya itu pengawasan diperlukan oleh seluruh elemen masyarakat agar program ini dapat tersalurkan sesuai dengan peruntukan dan tidak melanggar aturan.

Diperlukan pelibatan pihak keamanan, guna memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud melalui pengawasan langsung dan sekaligus menindak secara hokum bagi masyarakat yang tidak bertanggungjawab atau secara personality dan kelompok yang dapat menggagalkan program atau menguntungkan diri sendiri dan mengorbankan masyarakat miskin dan pihak UMKM, serta sosialisasi atas standar operasional prosedur pelayanan distributor melalui penyediaan standar dan fasilitas pengerjaan, dimaksudkan sebagai bentuk upaya pemberian arahan, bimbingan, ataupun pelatihan kepada segenap implementator dan masyarakat.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan subsidi LPG 3 Kg di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dalam memenuhi harapan dan kebutuhan public, dibutuhkan implementasi kebijakan sebagai alat ukur kinerja yang dapat mempengaruhi yaitu faktor kuminikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hal ini menunjukkan adanya ketepatan sasaran dan tujuan telah di transformasikan ke aktor dan objek, termasuk konsistensi dan komitmen pelaksana kebijakan sudah efektif dan berjalan dengan baik. Dalam aspek karakteristik kebijakan dan struktur birokrasi terlihat penerapan SOP oleh agen/distributor selaku pelaksana telah di implementasikan dengan baik, namun masih memerlukan langkah nyata dalam mewujudkan program subsidi LPG 3 Kg ini, terutama karena masih ditemukan kelemahan pada distribusi dan penyaluran ke publik secara tertutup dan masih menerapkan secara

terbuka.

2. Faktor determinan kebijakan ini adalah adanya ketersediaan LPG 3 Kg di hulu/pertamina cukup memadai, dan ditopang oleh sumber daya Kabupaten Wajo. berkaitan dengan hambatan dalam program subsidi LPG 3 Kg ini sangat terlihat dari pespektif transformasi dan mobilisasi serta birokrasi yang cukup panjang, dan lemahnya pengawasan penyaluran program subsidi LPG 3 Kg yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penyaluran program ini, kelangkaan LPG 3 Kg ini, menjadi perhatian khusus pemerintah dan memerlukan pengawasan yang mendalam sebab kelangkaan ini dapat terjadi karena distribusi mengalami permasalahan pada mobilisasi sehingga kadang tertunda, langkah dijalankan oleh implementator sebagai solusi antara lain adalah organ-organ yang terlibat dari pemerintah melalui BUMN dapat berkolaborasi dengan pemerintah setempat guna memastikan program ini dapat berjalan dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno, (2007) "Kebijakan Publik Teori dan Proses" Buku Kita, Jakarta.
- Dwijowijoto, N. 2006 " *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*" Jakarta : Elex media Komputindo.
- Edwar III, George C. (1980), "Implementing Public Policy" Congressional Quarterly Press. Washinton.
- Harbani Pasolong, 2007 " *Teori administrasi Public*", Alfabeta Bandung
- Inu Kencana Syafie, " *Ilmu Administrasi Publik* ", Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Thoha Miftah 2008. " *Administrasi Publik Kontemporer*" Kencana Prenada Group Jakarta
- Sugiyono, 1997. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfa Beta
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R & D*. Bandung Alfa Beta
- Soebarsono, (2005) "Analisis Kebijakan Publik" (Konsep, Teori dan Aplikasinya) Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- William N. Dunn, 2003. " *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*" edisi kedua Gajah Mada University Press

Yogi Suprayogi Sugandi, 2011 "*Administrasi Publik*" Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia. Graha Ilmu Yogyakarta.

Ulbert Silalahi, Drs. M.A., 2005. "*Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*". Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Undang-Undang NO. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Perpres NO. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional

Perpres No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg

Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG

Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan sub penyalur LPG 3 Kilogram (LPG tertentu).